

## SISTEM KINERJA PENGADAAN, PENGAWASAN FISIK, DAN PENGAWASAN PEKERJAAN PADA BAGIAN UMUM SETDA KOTA MATARAM

Muh Zulfi Walidaen<sup>1</sup>, Mellya Erawana Sartika<sup>2</sup>, Rizna Susmita<sup>3</sup>, Rahmad Hidayat<sup>4</sup>, Aprian Jaelani<sup>5</sup>

[muhammadzulfi@gmail.com](mailto:muhammadzulfi@gmail.com)<sup>1</sup>, [mellyerwanasartika@gmail.com](mailto:mellyerwanasartika@gmail.com)<sup>2</sup>, [riznasusmita420@gmail.com](mailto:riznasusmita420@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rahamat\\_dayat22@yahoo.com](mailto:rahamat_dayat22@yahoo.com)<sup>4</sup>, [aprian.jaelani@ummat.ac.id](mailto:aprian.jaelani@ummat.ac.id)<sup>5</sup>

Universitas muhammadiyah Mataram

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem kinerja pengadaan barang/jasa, pengawasan fisik, dan pengawasan pekerjaan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram. Ketiga aspek ini merupakan bagian penting dari tata kelola administrasi pembangunan dan pelayanan publik yang efektif serta akuntabel. Pengadaan yang tidak efektif dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, sementara pengawasan fisik dan pekerjaan yang lemah berpotensi mengakibatkan rendahnya kualitas hasil pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pejabat struktural dan pelaksana kegiatan di Bagian Umum Setda Kota Mataram, observasi langsung, serta studi dokumen dan laporan realisasi fisik maupun keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pengadaan telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam hal perencanaan kebutuhan, koordinasi antarbagian, serta monitoring pelaksanaan kegiatan. Pengawasan fisik dan pekerjaan juga menunjukkan adanya kendala dalam hal SDM pengawas, keterbatasan waktu, dan kurang optimalnya penggunaan teknologi pengawasan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kapasitas SDM, sistem evaluasi berkala, serta integrasi sistem informasi pengadaan dan pengawasan yang lebih modern guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi perbaikan tata kelola pembangunan di lingkup pemerintahan daerah.

**Kata Kunci:** Kinerja Pengadaan, Pengawasan Fisik, Pengawasan Pekerjaan, Bagian Umum, Setda Kota Mataram.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze and evaluate the procurement performance system of goods/services, physical supervision, and work supervision in the General Section of the Mataram City Regional Secretariat. These three aspects are important parts of effective and accountable public service and development administration governance. Ineffective procurement can lead to budget waste and delays in activity implementation, while weak physical and work supervision has the potential to result in low quality development results. This study uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques in the form of in-depth interviews with structural officials and activity implementers in the General Section of the Mataram City Regional Secretariat, direct observation, and document studies and physical and financial realization reports. The results of the study indicate that although the procurement system has followed the provisions of laws and regulations, in practice there are still challenges in terms of planning needs, coordination between sections, and monitoring the implementation of activities. Physical and work supervision also shows obstacles in terms of supervisory human resources, time constraints, and less than optimal use of supervision technology. By identifying inhibiting and supporting factors, this study recommends increasing human resource capacity, a periodic evaluation system, and integration of a more modern procurement and supervision information system to increase transparency and efficiency. This research is expected to be a strategic input for improving development governance in the scope of local government.*

**Keywords:** *Procurement Performance, Physical Supervision, Work Supervision, General Section, Mataram City Secretariat.*

## **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran vital dalam mendukung efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. Untuk menjamin akuntabilitas dan efisiensi, pengadaan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, efisiensi, dan keadilan. Menurut Hidayat (2021), pengadaan yang dirancang melalui sistem e-procurement terbukti mampu meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran, serta meminimalisasi praktik korupsi dalam proses administrasi pengadaan di lingkup pemerintah daerah.

Hal senada disampaikan oleh Sholeh, dkk. (2022), bahwa sistem pengadaan yang baik harus memenuhi unsur keterbukaan, persaingan sehat, dan akuntabilitas guna menjamin hasil kerja yang berkualitas. Dalam konteks pengawasan, pengawasan fisik proyek sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak dan standar teknis.

Seperti dikemukakan oleh Rifaid & Zulkarnain (2021), pengawasan yang kuat berdampak langsung terhadap mutu dan keberhasilan program pembangunan infrastruktur daerah. Sementara itu, menurut Modul Pengawasan Konstruksi PUPR (2020), sistem pengawasan yang lemah kerap menyebabkan deviasi pekerjaan di lapangan, baik dari sisi volume, kualitas, maupun biaya. Oleh karena itu, sistem kinerja pengadaan yang disertai dengan pengawasan fisik dan administratif yang efektif menjadi sangat penting untuk diterapkan secara menyeluruh di setiap satuan kerja, termasuk di Bagian Umum Setda Kota Mataram. Evaluasi dan pengendalian pekerjaan juga harus dilakukan secara berkala agar tujuan pengadaan benar-benar tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat luas (Nani & Ali, 2018).

Siregar (2019) menyatakan bahwa “pengadaan yang dilakukan dengan sistem kinerja yang baik akan berdampak positif terhadap pencapaian program pembangunan yang berkelanjutan.” Dalam konteks ini, sistem kinerja pengadaan di pemerintahan tidak hanya melibatkan proses administratif, tetapi juga mencakup pengawasan yang ketat terhadap implementasi fisik pekerjaan. Lebih lanjut, Halim dan Syafruddin (2019) mengungkapkan bahwa “kualitas pengawasan pekerjaan pemerintah menjadi faktor dominan dalam menentukan keberhasilan suatu proyek, terutama pada sektor publik.” Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan pekerjaan tidak boleh dipisahkan dari aspek manajemen kinerja pengadaan secara keseluruhan.

Dalam realitas pelaksanaan di daerah, masih sering ditemukan berbagai hambatan seperti keterbatasan tenaga teknis, lemahnya koordinasi antar unit kerja, serta rendahnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Winarno (2018) mengungkapkan bahwa “masalah klasik dalam pengadaan di pemerintah daerah adalah lemahnya integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.” Menurut, Supriyono (2021) menekankan pentingnya sinergi antara pengawasan internal dan eksternal, serta penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengadaan, guna mendorong akuntabilitas dan efisiensi. Dalam hal ini, Bagian Umum Setda Kota Mataram perlu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem kinerja pengadaan dan pengawasannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam sistem kinerja pengadaan, pengawasan, dan pengawasan pekerjaan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram. Pendekatan ini dianggap

relevan karena memungkinkan peneliti memahami fenomena yang kompleks secara kontekstual melalui interaksi langsung di lapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat (2022) dalam penelitiannya berjudul Analisis Kinerja Sistem Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah Kota Mataram, pendekatan kualitatif efektif untuk menggali masalah pengadaan yang tidak selalu dapat diungkap secara kuantitatif, terutama ketika berhubungan dengan aspek prosedural dan hambatan birokrasi. Dukungan metodologis juga dapat dilihat dalam penelitian Hidayat (2018) mengenai implementasi kebijakan pariwisata halal di NTB, di mana pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dinamika pelaksanaan kebijakan dari berbagai perspektif stakeholder. Selain itu, dalam penelitiannya tentang Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Program Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban di Kota Mataram, Hidayat (2023) juga menggunakan wawancara mendalam dan observasi untuk mengukur persepsi warga terhadap pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, model kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi dinilai tepat untuk mengungkap sistem dan kinerja pengadaan serta pengawasan pekerjaan secara menyeluruh dan kontekstual

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang komprehensif dan relevan mengenai sistem kinerja pengadaan barang dan jasa setda kota mataram

Oleh karena itu, model kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi dinilai tepat untuk mengungkap sistem dan kinerja pengadaan serta pengawasan pekerjaan secara menyeluruh dan kontekstual

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengimplementasi bahwa sistem kinerja pengadaan, pengawasan fisik, dan pengawasan pekerjaan menunjukkan peningkatan efisiensi serta komponen yang secara terusun dan tertata dengan baik. Pengawasan fisik dilakukan secara bertahap sedangkan pengawasan pekerjaan mencapai tingkat efektivitas dalam memastikan kualitas hasil kerja, berikut pembahasan dan hasil yang sudah kami observasi.

### A. Sistem Kinerja Pengadaan di Bagian Umum Setda Kota Mataram

Sistem kinerja pengadaan di Bagian Umum Setda Kota Mataram mengacu pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mendukung operasional kegiatan pemerintahan, pemeliharaan fasilitas perkantoran, hingga kebutuhan kegiatan rutin dan strategis Sekretariat Daerah. Ciri utama sistem kinerja pengadaan di Bagian Umum Setda kota mataram meliputi:

1. Pelaksanaan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
2. Adanya koordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
3. Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan
4. Penekanan pada transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas
5. Sistem pelaporan berbasis aplikasi e-monitoring atau SIMDA BMD.

PAKET PENGADAAN BAGIAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024		
NO	NAMA ASET	KETERANGAN
1	Perencanaan Rehab Toilet Kantor Setda	KUASA DIREKTUR
	Dokumen Proses Pengadaan	ASLI
	Dokumen Pemilihan	ASLI
	RAB	ASLI
	Detail Engineering Design	ASLI

	Inovice	ASLI
	Spesifikasi Teknik	ASLI
2	Rehab Toilet Kantor Sekda	ASLI
	Dokumen Proses Pengadaan	
	Dokumen Pemilihan	ASLI
	Laporan Pelaksanaan	ASLI
	Laporan Bulanan	ASLI
3	Perencanaan Paparan Informasi	ASLI
	Dokumen Proses Pengadaan	
	Dokumen Pemilihan	ASLI
	Spesifikasi Teknik	ASLI
	Invoice	ASLI
	RAB	ASLI
	Detail Engineering Desain	ASLI
4	Penngawasan Pemandahan Dan Pembangunan Lokasi Jaringan Trafo, Ganset Dan ATS	ASLI
	Dokumen Proses Pengadaan	
	Laporan Mingguan	ASLI
	Invoice	ASLI
5	Pembongkaran Dan Penataan Eks Lokasi Genset Dan Trafo	ASLI
	Dokimen Proses Pengadaan	ASLI
	RAB	ASLI
	Laporan Foto Dokumentasi Pekerjaan	ASLI
	Dokumen Penawaran	ASLI
	Pengadaan Barang Dan Jasa	ASLI
6	Perencanaan Pemandahan Dan Pembangunan Lokasi Jaringan Trafo, Genstet Dan ATS	ASLI
	Dokumentasi proses Pengadaan	ASLI
	Company Profile	ASLI
	Invoice	ASLI
	Spesifikaasi Teknik	ASLI
	RAB	ASLI
	Detail Engineering Design	ASLI
7	Pekerjaan Lanjutan Penataan Ruang Dekranasda	ASLI
	Proses Pengadaan Langsung	ASLI
	Dokumen Kegiatan	ASLI
	Dokumen Pemilihan	ASLI
	RKS	ASLI
	RAB	ASLI
	Invoice	ASLI
	Detail Engineering Desaign	ASLI

8	Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Dekranasda	ASLI
	Proses Pengadaan Langsung	ASLI
	Dokumen Kegiatan	ASLI
	Laporan Mingguan	ASLI
	Laporan Pengawasan	ASLI
	Invoice	ASLI
9	Perencanaan Pekerjaan Lanjutan Dekranasda	ASLI
	Proses Pengadaan Langsung	ASLI
10	Pekerjaan Peindahan Dan Pembangunan Lokasi Jaringan Trafo, Genset, Dan ATS	ASLI
	Dokumen Proses Pengadaan Langsung	ASLI
	Time Shedule Realisasi	ASLI
	Laporan mingguan	ASLI
	Lampiran Foto Dokumentasi	ASLI

Bagian Umum Setda Kota Mataram, sistem ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal seperti pengadaan barang operasional, pemeliharaan aset, kegiatan protokoler, dan renovasi infrastruktur. Sistem kinerja pengadaan Setda kota mataram terdiri dari beberapa komponen penting yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Komponen pertama adalah perencanaan pengadaan, yang dimulai dari penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan kebutuhan riil organisasi perangkat daerah. RUP ini harus diumumkan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jenis, jumlah, dan waktu pengadaan telah dirancang secara matang, sehingga dapat menghindari pemborosan anggaran dan pengadaan mendadak. Komponen kedua adalah pemilihan penyedia, yang dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh regulasi seperti tender umum, pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau e-purchasing. Proses pemilihan penyedia dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pengadaan dengan memanfaatkan platform elektronik seperti LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Tahapan dalam proses ini meliputi pengumuman, evaluasi dokumen penawaran, klarifikasi, negosiasi, hingga penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak

Selanjutnya, terdapat komponen pelaksanaan kontrak, yang mencakup seluruh kegiatan operasional penyedia dalam memenuhi isi kontrak kerja. Di sini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama pengawas teknis memastikan bahwa spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan dijalankan sesuai kontrak. Pelaksanaan kontrak juga menyangkut pengendalian terhadap mutu dan waktu, serta mekanisme pembayaran berdasarkan progres atau termin yang telah disepakati. Komponen keempat adalah pengawasan dan pengendalian, yang merupakan aspek krusial dalam menjamin integritas proses pengadaan. Pengawasan dilakukan oleh PPK, pengawas fisik, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Proses ini meliputi pemeriksaan administrasi, fisik, dan keuangan dari kegiatan pengadaan. Dalam tahap ini, berbagai dokumen seperti Berita Acara Serah Terima (BAST), laporan kemajuan pekerjaan, dan dokumentasi foto lapangan menjadi bahan acuan utama dalam monitoring dan evaluasi. Terakhir, komponen evaluasi dan pelaporan menjadi langkah penting untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan pengadaan telah sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Evaluasi meliputi

penilaian terhadap kinerja penyedia, realisasi output pekerjaan, serta efisiensi penggunaan anggaran. Hasil dari evaluasi ini menjadi dasar bagi instansi untuk melakukan perbaikan sistem pengadaan di masa mendatang. Dengan kelima komponen ini berjalan optimal, maka sistem kinerja pengadaan dapat mencerminkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah Rifa'id & Zulkarnain (2021) menemukan bahwa proses e-procurement melalui LPSE NTB sudah cukup transparan, meskipun terdapat kekurangan seperti tidak tercantumnya nilai HPS atau nama pemenang pada beberapa paket lelang .

### **B. Sistem Pengawasan Fisik Di Bagian Umum Setda Kota Mataram**

Sistem pengawasan fisik dalam proyek pengadaan pemerintah, termasuk di lingkungan Bagian Umum Setda Kota Mataram, terdiri dari beberapa komponen penting yang saling terintegrasi guna menjamin mutu, waktu, dan biaya pelaksanaan proyek sesuai kontrak. Sistem pengawasan Fisik Setda kota Mataram terdiri dari beberapa komponen penting yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pengawasan fisik. Komponen pertama adalah perencanaan pengawasan, yang meliputi penentuan jadwal kunjungan lapangan, identifikasi risiko teknis, dan penyiapan alat ukur serta dokumen pengawasan. Komponen kedua adalah pengawasan lapangan (on-site), yaitu kegiatan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik di lokasi proyek. Pengawas akan memeriksa kesesuaian antara volume pekerjaan dengan gambar rencana, spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan. Menurut Hidayat (2021), pengawasan teknis di lingkungan pemerintah daerah sangat menentukan mutu output proyek karena berfungsi sebagai alat pengendalian mutu, waktu, dan biaya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Arifin (2020), yang menyatakan bahwa lemahnya pengawasan fisik di lapangan sering kali menjadi penyebab utama terjadinya deviasi volume pekerjaan, keterlambatan penyelesaian, dan bahkan kegagalan bangunan. Oleh karena itu, pengawasan fisik di Setda Kota Mataram tidak hanya dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kontrak, tetapi juga untuk menjamin akuntabilitas penggunaan APBD serta efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan internal.

Selanjutnya, komponen ketiga adalah dokumentasi dan pelaporan, berupa pencatatan hasil pemeriksaan lapangan, dokumentasi foto, serta penyusunan laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Komponen keempat adalah pengendalian mutu, yaitu pengujian atau verifikasi terhadap bahan bangunan dan metode pelaksanaan agar sesuai dengan standar teknis Modul Pengawasan Konstruksi PUPR (2020) bahkan menekankan bahwa pengawasan yang aktif dan terstruktur mampu menurunkan risiko penyimpangan pekerjaan serta meningkatkan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Maka dari itu, pengawasan fisik yang efektif merupakan salah satu indikator kinerja penting dalam siklus pengadaan yang harus diperkuat oleh semua satuan kerja pemerintah daerah. Terakhir, terdapat komponen evaluasi dan tindak lanjut, yang berfungsi untuk mengevaluasi hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan deviasi, serta memastikan penyedia jasa melaksanakan koreksi sebagaimana mestinya. Dengan penerapan seluruh komponen ini secara menyeluruh, pengawasan fisik dapat berjalan optimal dan berkontribusi dalam mencegah penyimpangan, menjamin kualitas pekerjaan, serta memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran.

### **C. Sistem Pengawasan pekerjaan Bagian Umum Setda Kota Mataram**

Sistem pengawasan pekerjaan merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek atau kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, baik dari segi waktu, kualitas, maupun biaya. Di lingkungan Bagian Umum Setda Kota Mataram, sistem ini mencakup pengawasan administratif dan teknis atas

seluruh proses kerja yang dilakukan oleh pihak pelaksana, mulai dari tahap awal pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan. Pengawasan dilakukan secara periodik dan menyeluruh untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan, keterlambatan, atau penyalahgunaan anggaran.

Menurut Hidayat (2021), pengawasan yang baik tidak hanya mencakup pemantauan lapangan, tetapi juga mencakup evaluasi dokumen administrasi dan capaian output fisik proyek. Pengawasan ini dilakukan oleh tim pengawas internal seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengawas teknis, dan staf pengendali kegiatan, yang semuanya bertanggung jawab memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Lebih lanjut, Siregar (2020) menekankan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada pelaksanaan teknis di lapangan, tetapi juga pada sistem pengawasan pekerjaan yang mampu menegakkan disiplin kontraktual dan transparansi dalam pelaporan hasil. Oleh karena itu, sistem pengawasan pekerjaan bukan hanya sekadar kegiatan pemantauan, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol manajerial yang strategis untuk menjamin akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lingkup pemerintahan.

Agar sistem pengawasan pekerjaan di lingkungan Setda Kota Mataram dapat berjalan dengan optimal dan menghasilkan output yang akuntabel, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, penyusunan perencanaan pengawasan yang sistematis, termasuk menetapkan jadwal pengawasan, tim pengawas, indikator evaluasi, dan perangkat kerja teknis yang sesuai. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yakni dengan memberikan pelatihan teknis dan administratif kepada aparatur pengawas agar mereka memahami regulasi, spesifikasi teknis, dan mekanisme pelaporan. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi monitoring progres kegiatan berbasis digital, guna memudahkan pengawasan secara real-time dan transparan. Keempat, penegakan standar mutu dan integritas kerja, yang dilakukan dengan cara mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Menurut Hidayat (2021), sistem pengawasan yang efektif memerlukan sinergi antara regulasi, teknologi, dan kapasitas SDM agar dapat menekan risiko deviasi pekerjaan. Sementara itu, menurut Susanti & Bahar (2019), keberhasilan pengawasan proyek pemerintah tidak hanya ditentukan oleh frekuensi pengawasan, tetapi juga oleh kualitas laporan pengawasan, kecepatan tindak lanjut, dan keberanian mengambil keputusan korektif. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pengawasan pekerjaan di Setda Mataram sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, koordinasi lintas bidang, serta konsistensi pelaksanaan evaluasi berkala yang berbasis data dan fakta lapangan. Tentu, berikut adalah kesimpulan dalam bentuk poin yang terpisah untuk masing-masing aspek pengadaan, pengawasan fisik, dan pengawasan pekerjaan, dengan penekanan isi dan didukung kutipan secara implisit:

## **KESIMPULAN**

### **1. Sistem Pengadaan**

Sistem pengadaan di Bagian Umum Setda Kota Mataram telah mengikuti prosedur standar seperti perencanaan kebutuhan, penyusunan HPS, hingga proses tender. Namun, keberhasilannya masih sangat dipengaruhi oleh kejelasan dokumen perencanaan dan kedisiplinan jadwal pelaksanaan. Sistem pengadaan yang baik akan mencegah keterlambatan proyek dan memastikan efisiensi anggaran, sebagaimana ditegaskan dalam hasil kajian Hidayat (2021) bahwa transparansi dan perencanaan matang adalah faktor utama dalam efisiensi pengadaan publik.

### **2. Sistem Pengawasan Fisik**

Pengawasan fisik memainkan peran vital dalam menjamin bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai rencana teknis dan anggaran. Di lingkungan Setda Kota Mataram, pengawasan ini telah dilakukan melalui monitoring lapangan dan pelaporan berkala. Namun, masih diperlukan konsistensi dalam pelaporan progres serta verifikasi lapangan yang lebih detail agar kualitas fisik pekerjaan terjaga. Seperti disampaikan oleh Arifin (2020), lemahnya pengawasan fisik dapat berdampak pada kualitas hasil dan keterlambatan proyek.

### 3. Sistem Pengawasan Pekerjaan

Pengawasan pekerjaan diartikan sebagai pengendalian terhadap proses pelaksanaan proyek secara administratif dan teknis. Dalam praktiknya di Setda Kota Mataram, hal ini mencakup pelaporan rutin, kontrol progres, dan tindak lanjut terhadap temuan. Kinerja pengawasan ini akan lebih efektif jika didukung oleh koordinasi antar bidang serta evaluasi kinerja penyedia jasa. Menurut Susanti & Bahar (2019), pengawasan pekerjaan yang berhasil adalah yang mampu mendorong kedisiplinan kontraktual dan akuntabilitas pelaksanaan.

### Saran

Pemerintah Kota Mataram, khususnya Bagian Umum Setda, perlu memperkuat perencanaan pengadaan sejak tahap awal dengan memastikan seluruh dokumen teknis, rencana anggaran biaya (RAB), dan jadwal pelaksanaan disusun secara akurat dan realistis. Selain itu, proses lelang dan seleksi penyedia jasa harus dilaksanakan secara transparan dan berbasis kompetensi, guna meminimalkan keterlambatan dan sengketa kontraktual.

### DAFTAR PUSTAKA

- adar BakhshBaloch, Q. (2017). No (Vol. 11, Issue 1).
- Alwanhendri1, Ahmad Husein Nasution2, Abdullah Siraih3, Dasim4, M. N. (2023). Jurnal hbib 2. Perspektif Dan Perkembangan Teori Organisasi, Vol.02 No.(09), 25–39.
- Bachtiar, B. (2021). Analisis Fungsi Pengawasan Berbasis Kinerja Di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik, 10, 87–106. <https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.83>
- Barang, B. P., Sekretariat, J., Provinsi, D., Timur, J., & Barang, P. (1945). Kegiatan Administrasi Pengadaan Secara Elektronik Pada Biro Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Carfiorenalita Regina D . P , Diana Juni Mulyati , Ni Made Ida Pratiwi Program Studi Administrasi Niaga , Fakultas Ilmu Sosial dan I.
- Feronika, R. (2021). Model Pengawasan Kerja Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/16075%0Ahttps://repository.uir.ac.id/16075/1/197122096.pdf>
- Hendra, A., 1□, N., & Hidayat, R. (2022). Evaluasi Pengelolaan Ekowisata: A Systematic Literature Review. <https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/KolaborasiK>.
- Hidayat, R., & Ferbiyanti, I. (2023). Pelayanan Publik di Kota Mataram: Program Public Safety Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medical Service (MEMS). *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(1), 37–44. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i1.3086>
- Hidayat, R., & Suryono, A. (2014). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bos Dan Laporan Keuangan Bos. *Jurnal Reformasi*, 4, 34–43.
- Hidayat, R. H., Rahcman, M. T., & Burhan, M. R. (2020). Studi Komparasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2019 (Studi di Dinas Dukcapil Kota Mataram dan Dukcapil Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v6i2.131>
- Hukum, J. B. (2023). hlm. xx-xx. 2 contracts, Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, Article 1 number 10 and number 11 Law Number 1 of 2004 concerning State

- Treasury, Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods/Services. 7(1), 1–16.
- Luh, N., & Cantika, V. (2025). Kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam Meningkatkan E-Government melalui E-Katalog Umkm ( Usaha Mikro , Kecil dan Menengah ) Lokal di Kabupaten Badung. 2(5).
- Mustamin, M., Hidayat, R., & Alfian, Y. (2020). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemulihan Pembangunan Fisik Pasca Gempa (Studi Di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i2.2794>
- P. Budrueac. (n.d.). Jurnal 2.Pdf. In *Journal of thermal analysis*.
- Pelayanan, T., Tahun, P., Dinas, D. I., Kota, D., Dan, M., & Lombok, K. (2020). Comparison of Public Satisfaction Surveys ( Skm ) To Public Services in 2019 in Dukcapil Dinas. 6(2).

**Buku**

- Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Wahyuni, D. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Malang: UB Press.
- Kusumawiranti, R. (2021). Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan .*Populika*, 9(1), 12-19.

SUMBER DATA SKUNDER